

**PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELENGGARAAN  
LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT  
KECAMATAN KUTAPANJANG**

**TESIS**

OLEH

**EMMIL MOHD. ARIEF MATONDANG  
NPM. 191801092**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELENGGARAAN  
LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT  
KECAMATAN KUTAPANJANG**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**EMMIL MOHD. ARIEF MATONDANG  
NPM. 191801092**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo  
Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan bagi  
Masyarakat Kecamatan Kutapanjang**

**Nama : Emmil Mohd. Arief Matondang**

**NPM : 191801092**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Adam, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 11 September 2021**

---

---

**Nama : Emmil Mohd. Arief Matondang**

**NPM : 191801092**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si**

**Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP**

**Penguji Tamu : Dr. Kaiman Turnip, MA**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 11 September 2021

Yang menyatakan,



**Emmil Mohd. Arief Matondang**

## 5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Emmil Mohd. Arief Matondang  
NPM : 191801092  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang .

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal : 15 November 2021

Yang menyatakan



(Emmil Mohd. Arief Matondang)

## ABSTRAK

### PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN KUTAPANJANG

**N a m a** : Emmil Mohd. Arief Matondang  
**N P M** : 191801092  
**Program** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Adam, M.AP

Salah satu tugas pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gayo Lues adalah menciptakan lingkungan sehat perumahan melalui kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan rumah layak huni telah dilaksanakan di Kecamatan Kutapanjang, dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan diantaranya keterbatasan kesediaan anggaran daerah dan adanya aduan dari masyarakat yang merasa berhak menerima tetapi belum mendapatkan bantuan rumah layak huni. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat? Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat dan mengkaji serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dan teori analisis yang digunakan adalah teori Peran Biddle and Thomas. Instrument pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah : Peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat belum terlaksana secara efektif. Hal ini dilihat dari indikator : 1. Harapan : Masyarakat kurang mampu dikecamatan Kutapanjang belum dapat semua terpenuhi, 2. Norma : Pelaksanaan program rumah layak huni dilaksanakan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues dan didukung tersedianya anggaran tahun 2021, 3. Wujud Perilaku Penyelenggara : Dalam penentuan skala prioritas sasaran masih terjadi KKN, 4. Penilaian dan Sanksi : Penilaian sasaran sudah berdasarkan SOP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: 1. Agar pemerintah daerah Kab. Gayo Lues meningkatkan jumlah anggaran untuk membangun rumah layak huni. 2. Dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar dilakukan tidak berdasarkan KKN.

**Kata Kunci** : Peran, Dinas Perkim, Rumah Layak Huni

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE HOUSING AND SETTLEMENT AREA DEPARTMENT OF GAYO LUES REGENCY IN IMPLEMENTING A HEALTHY HOUSING ENVIRONMENT FOR THE COMMUNITY OF KUTAPANJANG DISTRICT**

**Name** : Emmil Mohd. Arief Matondang  
**Student Id Number** : 191801092  
**Study Program** : Master of Science Publik Administration  
**Advisor I** : Dr. Isnaini, SH, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. Adam, M.AP

*One of the development tasks at the Department of Housing and Settlement Areas (Perkim) of Gayo Lues Regency is to create a healthy housing environment through the construction of livable houses for underprivileged communities. The construction of livable houses has been carried out in Kutapanjang District, in its implementation it faces various problems including limited availability of local budgets and complaints from people who feel they have the right to receive but have not received housing assistance. The formulation of the problem in this study is: What is the role of the District Perkim Office. Gayo Lues in organizing a healthy housing environment for the people of Kutapanjang sub-district? What are the obstacles faced in the implementation of a healthy housing environment for the community? This study aims to examine and analyze the role of the District Perkim Office. Gayo Lues in organizing a healthy housing environment for the community and studying and analyzing the obstacles it faces. The research method used is descriptive qualitative research and the analytical theory used is the theory of the role of Biddle and Thomas. The data collection instruments were observation, interviews and documentation, while the data analysis used descriptive analysis. The results of this study are: The role of the District Perkim Office. Gayo Lues in the implementation of a healthy housing environment for the community has not been implemented effectively. This can be seen from the indicators: 1. Expectations: The underprivileged communities in Kutapanjang sub-district have not been able to fulfill all of them, 2. Norms: The implementation of the livable housing program is carried out through the Decree of the Regent of Gayo Lues Regency and supported by the availability of the 2021 budget, 3. Behavior of the Organizer: In determining the priority scale of targets, KKN still occurs. 4. Assessment and Sanctions: The target assessment is based on SOPs and is determined by a Regional Head Decree. Recommendations from this research are: 1. So that the local government of Kab. Gayo Lues increased the amount of the budget to build livable houses. 2. In determining the target recipients of assistance so that it is not based on KKN.*

**Keywords:** Role, Perkim Service, Decent Houses

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN KUTAPANJANG”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu baik itu materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, September 2021

**Penulis**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan Bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang"**

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Budi Hartono, M.Si.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Isnaini, SH, M.Hum dan Dr. Adam, M.AP.
5. Ayah dan Ibunda serta Isteri, serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2019/2020
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues. Khususnya Bapak Jakaria, S.Hut, MP selaku Kepala Dinas dan Bapak Eris Diansyah, ST selaku Kabid PSU
9. Responden Masyarakat kurang Mampu, Warga Dusun Temangar Desa Beranang, Bapak M. Ali

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. KerangkaTeori.....	7
2.1.1. Teori Peran .....	7
2.1.2. Permukiman dan Perumahan.....	15
2.1.3. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan .....	23
2.2. Penelitian Terdahulu .....	33
2.3. Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.1.1. Waktu Penelitian .....	39
3.1.2. Tempat Penelitian.....	39
3.2. Bentuk dan Jenis Penelitian .....	39
3.3. Sumber Data.....	40
3.3.1. Data Primer .....	40
3.3.2. Data Sekunder .....	41

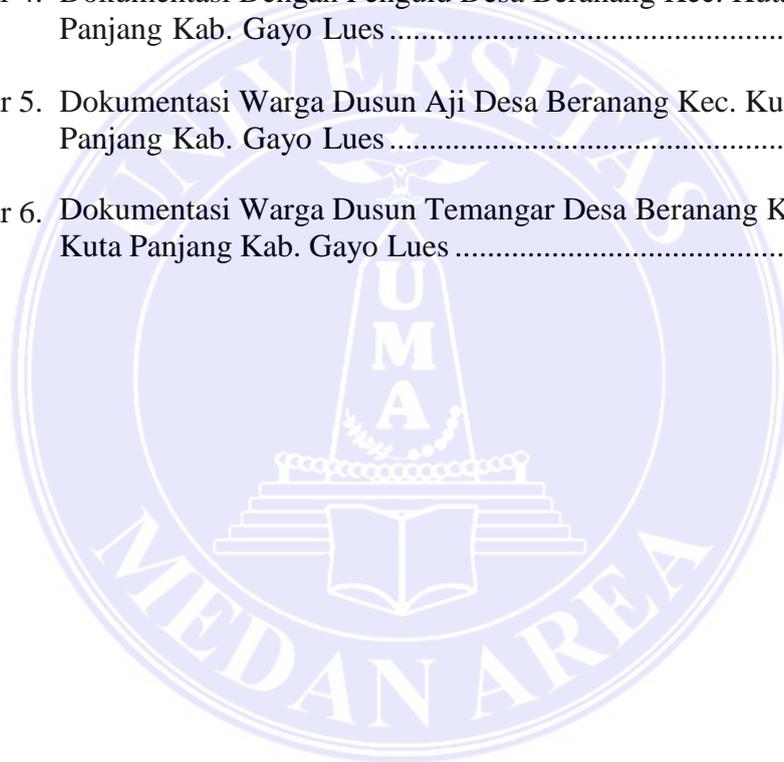
3.4. Informan Penelitian.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
<b>DAFTAR ISI</b>	
3.5.1. Observasi.....	42
3.5.2. Studi Dokumentasi.....	42
3.5.3. Wawancara.....	43
3.6. Defenisi Konsep dan Operasional.....	43
3.6.1. Defenisi Konsep.....	43
3.6.2. Defenisi Operasional.....	44
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues .....	46
4.1.1. Gambaran Umum.....	46
4.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	47
4.1.3. Struktur Dan Sumber Daya Pegawai.....	50
4.2. Peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues.....	51
4.3. Kendala Dinas Perkim Kab. Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan Bagi Masyarakat Kec. Kutapanjang .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Rekapitulasi Database Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020 .....	3
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Gayo Lues, 2019 ..	52
Tabel 3. Rekapitulasi Database Pembangunan Rumah Layak Huni Yang Dilaksanakan Dinas Perkim Kab. Gayo Lues Tahun 2017 - 2021	55
Tabel 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2019 .....	56
Tabel 5. Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, 2019 .....	57
Tabel 6. Realisasi Pagu Anggaran Rumah Layak Huni Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	50
Gambar 3. Dokumentasi Dengan Kepala Dinas dan Kabid PSU Dinas Perkim Kab. Gayo Lues .....	54
Gambar 4. Dokumentasi Dengan Pengulu Desa Beranang Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues .....	58
Gambar 5. Dokumentasi Warga Dusun Aji Desa Beranang Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues .....	59
Gambar 6. Dokumentasi Warga Dusun Temangar Desa Beranang Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab negara. Hal ini jelas tertuang dalam cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Tanggungjawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat secara lebih tegas lagi dinyatakan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”* Artinya bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kebutuhan dasar yang layak sesuai dengan kriteria kebutuhan hidup normal dan sehat demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab negara, dimana seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan atau menyelenggarakan program pelayanan kesehatan, yang dapat dilakukan baik melalui program lingkungan maupun program pemeliharaan kesehatan.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan menciptakan lingkungan sehat sebagai tempat hidup warga. Manusia atau warga masyarakat

sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena hidup manusia berasal dari interaksinya dengan lingkungan alam, sehingga perlu dijaga agar interaksi tersebut berlangsung dengan nyaman dan selaras tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan sehat maka lingkungan hidup menjadi nyaman, dan dapat menciptakan suatu keselarasan yang hakiki antara lingkungan dengan masyarakat yang mendiaminya.

Lingkungan sehat yang paling penting bagi masyarakat adalah lingkungan perumahan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian serta sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Dengan demikian perumahan sebagai lingkungan masyarakat merupakan tempat berdiam dan melakukan aktivitas sehari-hari sehingga sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di rumah dan lingkungan sekitarnya (perumahan), sehingga lingkungan perumahan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu mewujudkan lingkungan sehat perumahan, yaitu dengan menciptakan udara bersih terhindar dari pencemaran udara, serta mencegah terjadinya pencemaran tanah dan air. Disamping itu, lingkungan perumahan juga harus jauh dari kebisingan sehingga tidak

mengganggu aktivitas masyarakat, yang disertai dengan pengendalian suhu udara hingga batas-batas toleransi tubuh manusia.

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh terdiri dari 11 Kecamatan dan 145 Desa. Didalam menjalankan pembangunan dibidang perumahan didaerah Gayo Lues dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di Kecamatan Kutapanjang masyarakat yang kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 194 unit rumah (data Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, 2020), dan yang sudah dibantu oleh Pemda Gayo Lues sebanyak 40 unit rumah. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Rekapitulasi Database Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK yang belum memiliki rumah	Jumlah KK yang sudah memiliki rumah	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
1	Tampeng	992	292	48	244	244	223	21
2	Bener	835	253	19	234	234	223	11
3	Ulun Tanoh	531	164	16	148	148	134	14
4	Kuta Ujung	0	275	19	256	256	233	23
5	Beranang	652	218	22	196	196	160	36
6	Rikit Dekat	850	250	17	233	233	217	16
7	Rema	1.250	325	0	325	325	318	7
8	Rema Baru	676	202	6	196	196	179	17
9	Cike	320	103	6	97	97	86	11
10	Kerukunan Kuta Panjang	0	407	0	407	436	433	3
11	Tampeng Musara	600	200	2	198	198	181	17
12	Kong Paluh	294	84	11	73	73	55	18
	<b>Jumlah</b>	<b>8.708</b>	<b>2.773</b>	<b>166</b>	<b>2.607</b>	<b>2.636</b>	<b>2.442</b>	<b>194</b>

Sumber diolah : Dinas Perkim Kabupaten Gayo Lues, 2020

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa di kecamatan Kutapanjang masih terdapat KK yang mempunyai rumah tidak layak huni di setiap desa. Hal

ini terlihat dari fakta di lapangan bahwa masih banyak rumah-rumah warga yang tidak mendapatkan rumah layak huni. Sebagaimana fakta yang ditemukan dilapangan bahwa masih ada warga yang menempati rumah tidak layak huni seperti di desa Beranang sebanyak 36 rumah tidak layak huni, kemudian diikuti desa Kuta Ujung sebanyak 23 rumah dan desa Tampeng sebanyak 21 rumah, sedangkan desa-desa lain berjumlah dibawah 20 rumah yang tidak layak huni.

Penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan di Kabupaten Gayo Lues merupakan bidang tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues atau disingkat dengan Dinas Perkim. Dalam pelaksanaannya Dinas Perkim belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan lingkungan sehat perumahan bagi warganya terutama dalam hal mengupayakan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu/ berpenghasilan rendah (MBR), hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran (Jakaria,S.Hut/Kepala Dinas Perkim Kab. Gayo Lues). Permasalahan yang lainnya adanya aduan dari masyarakat yang merasa berhak menerima tetapi belum mendapatkan bantuan rumah layak huni (Kasim dan M. Ali).

Untuk dapat mengetahui secara detail tentang pembangunan rumah layak huni di Gayo Lues perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul : **Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan Bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang.

2 Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam memberikan pelayanan pemukiman sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan teknik operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues khususnya kecamatan Kutapanjang.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues guna penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Peran**

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Menurut Depdikbud (2015:751) bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2016:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peranan lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu :

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut Siagian (2012:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Davey (2011:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri

kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan

mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).

- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

#### b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:
  - a. Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
  - b. Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran

(*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

### c. Wujud Perilaku Dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

### d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan

suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutnya disebutnya juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

### 2.1.2. Permukiman dan Perumahan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.

Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan menurut Sadana (2014:19) bahwa perumahan dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Menurut Budiharjo (2012:148) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu

masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya.

Menurut Sadana (2014:20) Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.

#### **2.1.2.1. Klasifikasi dan Tipe Permukiman**

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman dapat dilihat dari klasifikasi permukiman dan tipe permukiman. Berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi dan tipe permukiman, yaitu :

##### **A. Klasifikasi Fungsi Permukiman**

Menurut Lewis Mumford (The Culture Of Cities, 1938) dalam Wesnawa, (2015:27) mengemukakan 6 jenis Kota berdasarkan tahap perkembangan permukiman penduduk kota. Jenis tersebut diantaranya:

1. Eopolis adalah tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota.
2. Tahap polis adalah suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat agraris.
3. Tahap metropolis adalah suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri.
4. Tahap megapolis adalah suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan.
5. Tahap tryanopolis adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu-lintas, tingkat kriminalitas tinggi.
6. Tahap necropolis (Kota mati) adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya.

## B. Tipe Permukiman

Menurut Wesnasa (2015:32) mengemukakan tipe permukiman dapat dibedakan menjadi 2 tipe permukiman.

### 1. Tipe Permukiman berdasarkan waktu hunian

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari (rumah tenda penduduk pengembara), dihuni hanya untuk beberapa bulan (kasus perumahan peladang berpindah secara musiman),

dan hunian hanya untuk beberapa tahun (kasus perumahan peladang berpisah yang tergantung kesuburan tanah). Tipe permanen, umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat permukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.

## 2. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

Pada hakekatnya permukiman memiliki struktur yang dinamis, setiap saat dapat berubah dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar, karena perubahan disertai oleh pertumbuhan.

Sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar, secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi dan kepentingannya. Jadi jika tempat terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis suatu kota besar maupun kecil akan menghindari kemandegan, kota akan berkembang baik kearah vertikal maupun horizontal, fungsi baru berkembang dan fungsi lama menghilang, pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula. Pada akhirnya terpenting untuk dipertimbangkan bahwa semua permukiman memiliki jati diri masing-masing secara khas. Baik tanpa fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur dan perencanaan jalan pada setiap permukiman memiliki keunikan sendiri.

### 2.1.2.2. Jenis dan Tipe-tipe Rumah

Terdapat berbagai macam jenis dan tipe tempat tinggal manusia. Bertambahnya penduduk dan semakin langkanya lahan yang tersedia untuk

membangun rumah mendorong manusia semakin kreatif dalam menciptakan jenis-jenis hunian. Berbicara tentang hunian atau tempat hunian atau tempat tinggal, pada dasarnya hunian tempat tinggal manusia adalah rumah. Menurut Sadana (2014:35-46) jenis dan tipe-tipe rumah sebagai berikut:

#### A. Rumah Sederhana

Rumah sederhana adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Dalam SNI 03-6981-2004 rumah sederhana tidak bersusun direncanakan sebagai tempat kediaman yang layak dihuni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau sedang. Oleh karena itu harganya harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Terdapat dua tipe rumah paling umum dipergunakan pada rumah sederhana, yaitu: rumah gandeng atau rumah kopel, dan rumah deret.

##### 1. Rumah Gandeng atau Rumah Kopel

Rumah gandeng atau rumah kopel adalah dua buah rumah yang bergandengan, dan masing-masing memiliki kapling sendiri. Pada rumah gandeng atau rumah kopel, salah satu dinding bangunan induk saling menyatu.

##### 2. Rumah Deret

Rumah deret adalah beberapa rumah yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. Pada rumah deret, salah satu atau kedua dinding bangunan induknya menyatu dengan dinding bangunan induk lainnya. Dengan sistem rumah deret, unit-unit rumah tersebut menjadi satu kesatuan. Pada rumah deret, setiap rumah memiliki kapling sendiri-sendiri.

## B. Rumah Sangat Sederhana

Rumah sangat sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan luas lantai 21 m<sup>2</sup> sampai dengan 36 m<sup>2</sup>. Suatu rumah sangat sederhana sekurang-kurangnya harus memiliki kamar mandi dan WC dan ruang serbaguna. Biaya pembangunan per m<sup>2</sup>. Rumah sangat sederhana harus ditekan serendah mungkin hingga sekitar setengah dan biaya pembangunan rumah sederhana. Rumah sangat sederhana umumnya berupa rumah deret guna memaksimalkan penggunaan lahan perumahan yang terbatas. Rumah sangat sederhana memiliki denah berbentuk empat persegi panjang. Atapnya berbentuk pelana, dengan kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup atap sangat sederhana, beton untuk sistem strukturnya, bata merah atau Concrete Block untuk dinding, kayu untuk pintu dan jendela, asbes gelombang untuk penutup atap.

## C. Rumah Maisonet

Maisonet berasal dari kata mai-son-ette. Maisonet adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih, dengan pintu masuk sendiri langsung dari luar. Maisonet adalah rumah sederhana berlantai dua, dan berupa rumah deret (SNI 03-6981-2004).

Maisonette merupakan fungsi hunian dengan ketinggian dua lantai. Karena bertingkat dua, maka rumah Maisonet menjadi tipe standar dari tempat tinggal bertingkat rendah dengan kapasitas hunian yang tinggi. Guna memaksimalkan manfaat lahan, tata ruang Maisonette dibuat sederhana untuk mengakomodasi kebutuhan secara minimal. Berbeda dengan apartemen atau rumah susun yang memiliki pintu utama (*Entrance*) untuk keluar masuk gedung. Setiap unit hunian

pada bangunan Maissonette memiliki pintu masuk sendiri yang langsung berhubungan dengan ruang luar. Baik unit tersebut menempati semua tingkat maupun masing-masing lantai ditempati oleh unit yang berbeda, setiap unit memiliki Entrance sendiri. Maissonette umumnya berupa bangunan deret atau bangunan rapat. Maissonette umumnya terletak di pusat kota, dan berada di daerah dengan kategori Low Rise adalah daerah yang hanya boleh dibangun sebanyak maksimal 4 tingkat. Dalam kasus tertentu Maissonette dapat dibangun di kawasan konservasi, dengan harapan tidak merubah wajah kota. Panjang suatu deretan rumah Maisonet maksimum 60 meter. Apabila berbentuk rumah gandeng dua, maka panjang persil maksimum adalah 120 meter (SNI 03-6981-2004).

#### D. Rumah Susun

Rumah susun atau disingkat rusun, pada dasarnya adalah apartemen versi sederhana. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat. Rumah susun dibangun dalam suatu lingkungan yang secara fungsional di susun dalam arah horizontal maupun vertikal. Tiap-tiap satuan rumah susun dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Rumah susun juga dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (SNI 03-7013-2004).

Satu buah bangunan rumah susun yang terdiri dari empat lantai dapat berisi puluhan unit hunian. Unit hunian pada rumah susun identik dengan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah. Bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah membangun rumah susun sederhana. Rumah susun sederhana dibangun dengan tujuan mewadahi aktivitas menghuni yang paling pokok. Luas

unit hunian pada rumah susun sederhana adalah minimal 18 m<sup>2</sup> dan maksimal 36 m<sup>2</sup> (SNI 03-7013-2004).

Banyaknya jumlah unit hunian dalam sebuah bangunan rumah susun menjadikan setiap bangunan rumah susun sebagai suatu lingkungan perumahan. Berbeda dengan rumah yang dibangun diatas tanah, pada rumah susun ratusan unit hunian dibangun di atas lahan yang sempit. Akibatnya , banyak kebiasaan baru dalam bertempat tinggal yang memerlukan penyesuaian diri. Perencanaan rumah susun harus memperhatikan faktor-faktor kenyamanan, keamanan, dan disesuaikan dengan perencanaan menyeluruh dari perencanaan lingkungan rumah susun. Untuk mendukung kondisi hidup bermasyarakat di rumah susun, penyediaan fasilitas-fasilitas lingkungan rumah susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (SNI 03-7013-2004; SNI 03-2485-1992):

- Memberi rasa aman, ketenangan hidup, kenyamanan dan sesuai dengan budaya setempat.
- Menumbuhkan rasa memiliki dan merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan gaya hidup di rumah susun.
- Mengurangi kecenderungan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas lingkungan bagi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
- Menunjang fungsi-fungsi aktivitas menghuni yang paling pokok baik dan segi besaran maupun jenisnya sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada.
- Menampung fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya.

Pada dasarnya, unit-unit hunian rumah susun adalah rumah tinggal serupa dengan rumah yang dibangun di atas tanah. Susunan ruang setiap unit hunian pada rumah susun hampir sama dengan susunan ruang pada rumah sederhana di atas tanah. Perbedaan yang tegas adalah setiap hunian tidak menghadap ke halaman dan jalan. Ada rumah susun, setiap unit hunian menghadap sebuah koridor atau selasar yang digunakan bersama. Terdapat dua macam tipe selasar atau koridor pada rumah susun, yaitu: selasar luar dan selasar dalam.

### **2.1.3. Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan**

#### **2.1.3.1. Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Lingkungan Pemukiman**

Persyaratan kesehatan lingkungan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :829/MENKES/SK/VII/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan adalah:

##### **a. Lokasi**

- 1) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor dan sebagainya.
- 2) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- 3) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan dan penerbangan.

##### **b. Kualitas udara, kebisingan dan getaran**

Kualitas udara ambient di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam atau aktifitas manusia dan memenuhi persyaratan

baku mutu udara yang berlaku, dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter sebagai berikut :

- 1) Tingkat kebisingan lokasi tidak melebihi 45-55 dbA
- 2) Gas berbau (H<sub>2</sub>S dan NH<sub>3</sub>) secara biologis tidak terdeteksi
- 3) Partikel debu diameter <10 µg tidak melebihi µg/m<sup>3</sup>
- 4) Gas SO<sub>2</sub> tidak melebihi 0,10 ppm
- 5) Debu terendap tidak melebihi 350 mm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> per hari
- 6) Tingkat getaran di lingkungan perumahan harus memenuhi maksimal 10mm/detik

c. Kualitas tanah

Kualitas tanah perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Timah hitam (Pb) maksimal 300 mg/kg
- 2) Arsenic total maksimal 100 mg/kg
- 3) Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg
- 4) Benzo (a) pyrene maksimal 1 mg/kg

d. Kualitas air tanah

Kualiatas air tanah pada daerah perumahan minimal memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sarana dan prasarana lingkungan

- 1) Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan

- 2) Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vector penyakit dan menimbulkan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kontruksi jalan tidak membahayakan kesehatan
  - b) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat
  - c) Bila ada pagar harus diberi pagar pengaman
- 4) Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- 6) Pengelolaan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- 7) Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan social seperti keamanan, kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian dan lain sebagainya.
- 8) Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 9) Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Binatang penular penyakit
- 1) Indeks lalat diperumahan harus memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Indeks jentik nyamuk (angka bebas jentik) diperumahan tidak melebihi 5%.
- g. Penghijauan
- Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keidahanm dan kelestarian alam.

### 2.1.3.2. Sarana Drainase Air

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan , prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau dibawah tanah, baik yang terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana drainase adalah bangunan perlengkapan yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air. Menurut sejarah terbentuknya, maka :

1. Drainase alamiah (*natural draignage*), yaitu system drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsure campur tangan manusia.
2. Drainase buatan (*artificial draignase*), yaitu system drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan, dan dimensi saluran.

### 2.1.3.3. Sarana Air Bersih

#### 1. Pengertian air bersih

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, air untuk keperluan hygiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mandi, cuci, masak, dan lain-lain) dan juga untuk keperluan lainnya (pertanian, industri, transportasi, dan lain-lain). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan yang kualitasnya memenuhi syarat dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Soetiman, mengemukakan bahwa setiap orang untuk kesehatannya memerlukan air lebih kurang 60 liter/hari dengan

rincian : 30 liter untuk mandi, 15 liter untuk mencuci, 15 liter untuk minum, pengolahan makanan serta untuk buang air besar (Untari, 2017:12).

## 2. Persyaratan keperluan hygiene sanitasi

a. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangan vector.

1) Tidak menjadi tempat perkembangan vector dan binatang pembawa penyakit

2) Jika menggunakan container sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu

b. Aman dari kemungkinan kontaminasi

1) Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah dibawah permukaan tanah.

2) Jika sumber air tanah non perpipaan, sarannya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri

3) Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat.

## 3. Sumber air

Air yang terdapat dipermukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Air angkasa (hujan), merupakan sumber air di bumi. Walau pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer.

Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbondioksida, nitrogen, dan ammonia.

- b. Air permukaan, yang meliputi badan badan air, semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi.
- c. Air tanah (ground water,) berasal dari air hujan yang jatuh ke tanah permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara ilmiah.

#### **2.1.3.4. Sarana Pembuangan Kotoran Manusia**

##### **1. Jamban**

Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran atau najis manusia yang lazim disebut kakus atau WC sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak terjadi penyebab atau penyebar penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman (Chandra, 2015:33).

Pada konteks ini yang dimaksud dengan kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dapat dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. zat-zat yang harus dikeluarkan ini berbentuk tinja (feces), air seni (urine), dan CO<sub>2</sub> (Notoatmodjo, 2011:18).

## 2. Syarat-syarat jamban keluarga

Menurut Chandra (2015:34) syarat-syarat jamban yang sehat untuk daerah pedesaan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mengotori tanah permukaan disekeliling jamban
- b. Tidak boleh mengotori air permukaan sekitarnya
- c. Tidak dapat dijangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa
- d. Tidak bau
- e. Mudah digunakan dirawat
- f. Desainnya sederhana
- g. Murah
- h. Dapat diterima oleh pemakainya.

## 3. Jenis sarana jamban keluarga

Berikut jenis-jenis jamban sesuai dengan teknologi pedesaan antara lain:

- a. Jamban cemplung yaitu jenis jamban sering dijumpai di pulau jawa.  
Hal yang perlu diperhatikan yaitu kakus cemplung tidak boleh terlalu dalam, sebab bila terlalu dalam akan mengotori air tanah dibawahnya.
- b. Jamban cemplung berventilasi jamban ini hampir sama dengan jamban cemplung, bedanya lebih lengkap, yakni menggunakan ventilasi pipa.  
Untuk daerah pedesaan pipa ventilasi ini dapat dibuat dari bambu.
- c. Jamban empang yaitu jamban ini dibangun diatas empang. Dalam sistem jamban empang ini disebut daur ulang, yakni tinja dapat langsung dimakan ikan.

- d. Jamban pupuk yaitu pada prinsipnya jamban ini seperti kakus cemplung, hanya lebih dangkal galiannya. Disamping itu jamban juga untuk membuang kotoran binatang dan sampah dedaunan.
  - e. Septictank yaitu angsa latrine merupakan cara yang paling memenuhi persyaratan, oleh sebab itu, cara pembuangan tinja semacam ini sangat di anjurkan.
4. Hubungan pembuangan kotoran terhadap kesehatan.

Jika kotoran manusia tidak tersimpan dengan baik atau diisolasi dengan baik, maka kuman atau telur cacing tersebut akan menularkan penyakit ke manusia lain yang sehat. Jika pembuangan kotoran manusia ditempat terbuka akan sangat berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan kesehatan lingkungannya, bau yang tidak sedap akan mengganggu kenyamanan.

#### **2.1.3.5. Sarana Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 ayat 1 butir 1, sampah adalah sisa sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah yang dimaksud disini merupakan sampah padat, menurut buku Chandra (2015:35), terdapat beberapa tahapan di dalam pengelolaan sampah padat yang baik, di antaranya, tahap pengumpulan dan penyimpanan ditempat sumber, tahap pengangkutan, dan tahap pemusnahan.

Sampah yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut:

1. Pemukiman penduduk, sampah disuatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau kota.
2. Tempat umum dan tempat perdagangan, memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan.
3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah, yang dimaksud disini antara lain, tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur, dan sarana pemerintah yang lain.
4. Industri berat dan ringan, dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengolahan air kotor dan air mium, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja.
5. Pertanian, sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, lading, ataupun sawah menghasilkan berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Dalam paradigma baru sekarang ini sampah tidak sepenuhnya menjadi benda padat yang sudah tidak dapat digunakan lagi, terdapat jenis sampah seperti sampah anorganik yang dapat di recycle dan bernilai ekonomis. Sampah di buang

pada tempat sampah yang terbuat dari plastik atau anyaman, pada bak sampah atau lubang pembuangan sampah di kediaman sendiri.

Jika sampah dibuang dengan benar, keuntungannya antara lain adalah menghindari timbulnya penyakit akibat Vektor dan bakteri yang berkembang dalam sampah, keadaan bersih sehingga menimbulkan kebanggaan dan kepuasan batin.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Kajian ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai studi-studi terdahulu, terutama yang berkaitan dan relevan dengan perkembangan serta pemanfaatan lahan. Sehingga diperoleh suatu temuan-temuan yang dapat dijadikan masukan dalam studi ini.

### 1. Kajian Kemampuan Dan Daya Tampung Lahan Perumahan Di Kawasan Perkotaan BWK Takengon Pusat (Tugas Akhir Wien Khutami Tahun 2015 Universitas Pasundan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota)

Kawasan perkotaan BWK Takengon Pusat yang terdapat pada Kabupaten Aceh Tengah mengalami perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan kebutuhan lahan untuk perumahan sangat tinggi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2003-2007 adalah 2.00% pertahunnya atau sekitar 691 jiwa pertahun. Maka dapat dipastikan bahwa jumlah ini tidak sesuai dengan daya tampung lahan menyebabkan kepadatan intensitas bangunan yang dapat berakibat sebagai permukiman kumuh.

Penelitian ini mengkaji mengenai kemampuan dan daya tampung lahan perumahan di Kawasan Perkotaan BWK Takengon Pusat dikarenakan

perkembangan permukiman pada kawasan Perkotaan BWK Takengon Pusat yang meningkat dengan adanya pertumbuhan penduduk. Akibat bertambahnya penduduk terjadinya perubahan peruntukan lahan yang memusat pada kawasan perkotaan. Pada Kawasan perkotaan BWK Takengon Pusat terdapat sebuah Danau Laut Tawar yang strategis untuk tempat tinggal bagi masyarakat, menyebabkan perkembangan yang tidak seimbang dengan daya dukung Lahan dan daya tampung lahan, kawasan perkotaan Takengon bagian pusat mengalami keterbatasan lahan yang dimiliki, meskipun memiliki potensi perkembangan yang cukup tinggi namun BWK Takengon Pusat ini memiliki lahan yang terbatas, sulit untuk dapat mendukung perkembangan BWK ini (sumber : RDTR BWK Pusat Takengon), Beberapa kawasan terbangun berada di garis sempadan danau dan sungai serta mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sudah melebihi daya tampung lahan, selain itu sebagian besar kawasan terbangun mempunyai garis sempadan bangunan dibawah standar yang ditetapkan. Hal seperti ini yang terjadi pada salah satu lokasi di kawasan Sungai Peusangan, dimana sebagian perumahan dibangun pada kawasan lindung yang menyebabkan penurunan jumlah mata air serta penurunan kualitas sungai yang disebabkan oleh banyaknya permukiman yang berada pada area resapan air. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi kemampuan lahan dan daya tampung lahan untuk perumahan pada kawasan Perkotaan BWK Takengon Pusat serta pemanfaatan peruntukan lahan yang ada untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan Kemampuan lahan perumahan potensial berupa potensi kemampuan lahan perumahan sebanyak 158,

14 Ha yang tersebar di 10 desa dan daya tampung lahan kawasan perkotaan BWK Takengon Pusat terhadap jumlah penduduk pada tahun 2033 tersebar di beberapa desa di kawasan perkotaan BWK Takengon Pusat yaitu, Desa Asir-Asir, Desa Asir-Asir Asia, Desa Merah Mersah, Desa One-One, dan Desa Takengon Timur dengan total jumlah yang tertampung sebesar 18.580 Jiwa. Sedangkan yang tidak tertampung terdapat pada Desa Bale Atu, Desa Blang Kolak I, Desa Blang Kolak II, Desa Hakim Bale Bujang, Desa Takengon Barat dengan total 5.084 Jiwa.

**2. Daya Dukung Lahan Untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (Jurnal Penelitian Yulianti Samsidar, Indarti Komala Dewi dan Bayu Wirawan Tahun 2013 Universitas Pakuan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**

Perkembangan kota serta peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas dan kebutuhan lahan untuk menunjang aktivitas tersebut, sementara lahan walaupun merupakan salah satu sumber daya alam yang paling berharga tetapi memiliki keterbatasan baik ketersediaan maupun kemampuan daya dukungnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fungsi kawasan lindung dan budidaya; mengidentifikasi kemampuan lahan kawasan budidaya berdasarkan aspek fisik dasar untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan; analisis daya dukung lahan serta menganalisis kesesuaian pemanfaatan lahan eksisting dan rencana pemanfaatan lahan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 dengan kemampuan lahan.

Hasil yang diperoleh berdasarkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan sistem informasi geografis menunjukkan kawasan lindung seluas 9.552 ha dan kawasan budidaya seluas 107.825 ha. Kawasan budidaya dengan

kemampuan pengembangan tinggi dan sedang merupakan wilayah yang sangat baik dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Ratio tutupan lahan/Building Coverage (BC) untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan pada kemampuan pengembangan tinggi sebesar 5,74% dan sedang sebesar 9,48% dengan kapasitas maksimal perluasan kedua lahan tersebut seluas 1.254 ha dan seluas 18.069 ha. Kesesuaian pemanfaatan lahan eksisting untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah permukiman, perkebunan, tegalan/lahan, tambak dan belukar sebesar 22,56% berada di kemampuan pengembangan tinggi dan sedang. Sedangkan kesesuaian rencana kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Pesawaran sebesar 45,54% berada di kemampuan pengembangan tinggi dan sedang.

### **3. Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Permukiman Bagi Masyarakat Golongan Menengah Ke Atas di Kecamatan Ngaliyan, Semarang (Tugas Akhir Astri Purnama Dewi Tahun 2013 Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota)**

Urbanisasi merupakan suatu proses pembentukan perkotaan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan fisik terbangun dan melalui urbanisasi tersebut terdeskripsikan perpindahan penduduk ke kota. Salah satu kota yang menjadi tujuan urbanisasi adalah Kota Semarang. Kota Semarang menjadi daerah tujuan karena selain merupakan ibukota Jawa Tengah, Kota Semarang juga memiliki berbagai macam aktivitas, sehingga permintaan kebutuhan ruang menjadi tinggi. Dengan terbatasnya ruang perkotaan, maka kawasan permukiman semakin berkembang di kawasan pinggiran kota. Salah satu kecamatan yang berada di pinggiran kota dan potensial untuk kawasan permukiman di Kota Semarang adalah Kecamatan Ngaliyan, yang bebas dari banjir, kondisi jaringan

air minum, sistem drainase, sanitasi lingkungan yang baik, jaringan telepon yang cukup, lingkungan yang sehat dan nyaman, serta fasilitas dan infrastruktur yang lengkap.

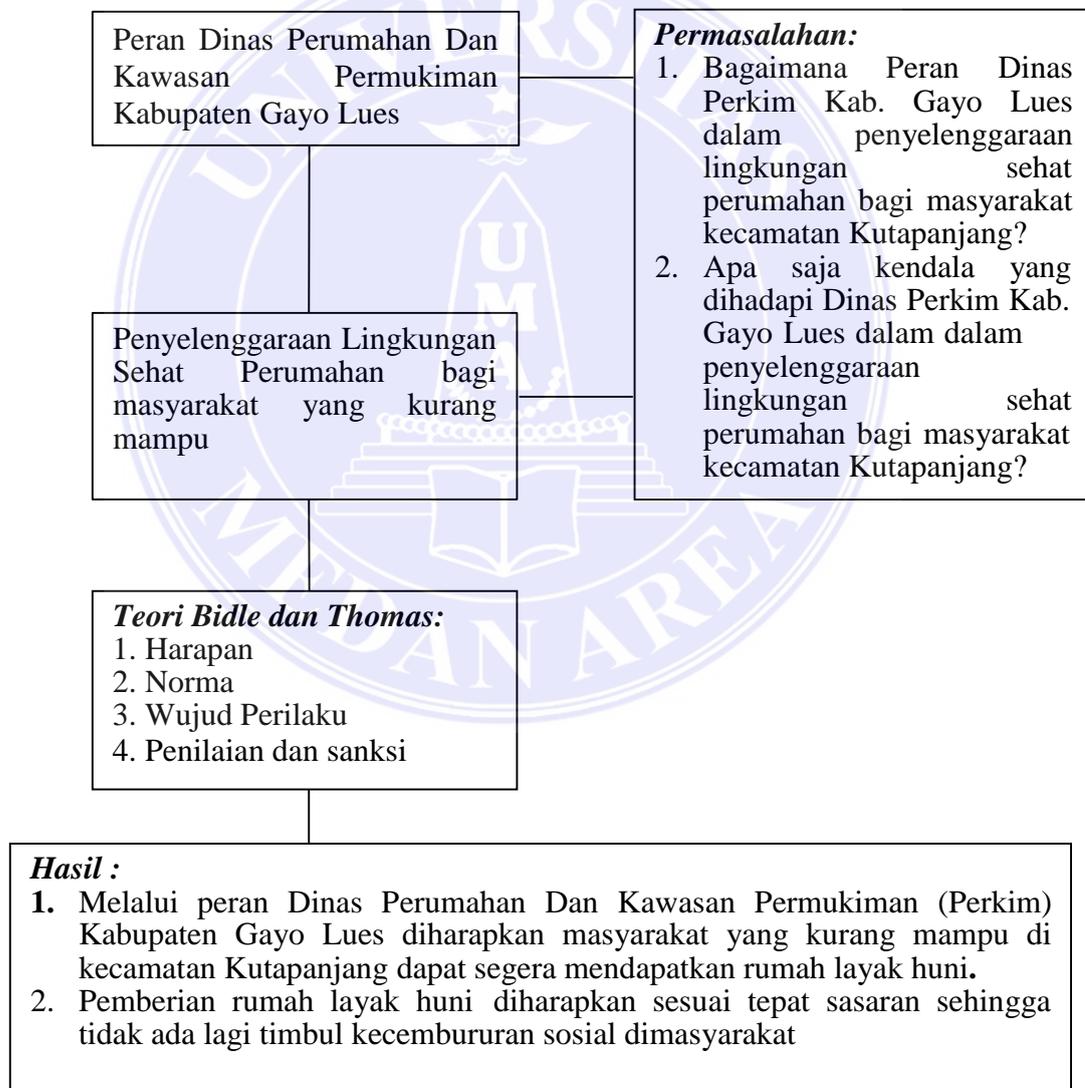
Hasil penelitian diperoleh kesesuaian lahan kawasan perumahan permukiman bagi masyarakat golongan menengah ke atas di Kecamatan Ngaliyan, Semarang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Beringin dan Ngaliyan yang masing-masing luasannya adalah 15,07 Ha untuk Kelurahan Ngaliyan dan 16,19 Ha untuk Kelurahan Beringin. Sumbangan yang dapat diberikan bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah dapat menambah wawasan mengenai kesesuaian lahan kawasan permukiman bagi masyarakat golongan menengah ke atas dalam bidang perencanaan wilayah dan kota terutama dibidang penataan dan perancangan bangunan serta keterkaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan adalah dapat digunakan sebagai masukan dalam membangun kawasan permukiman khususnya di Kecamatan Ngaliyan yang diperlukan bagi masyarakat golongan menengah ke atas.

Berdasarkan dari penelitian yang ada, maka gap research penelitian ini adalah fokus pada penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat Kecamatan Kutapanjang khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu/berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah layak huni yang memenuhi kriteria dan persyaratan dari kategori Lingkungan Sehat Perumahan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini adalah fokus pada penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang yang kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni. Berikut ini Gambar 1, Kerangka Pemikiran yang diolah disusun Penulis.

**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Diolah Penulis (2020)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian**

##### **3.1.1. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021 s/d Juli 2021.

##### **3.1.2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues terhadap satu kecamatan yaitu kecamatan Kutapanjang yang terdiri dari 12 Desa bagi masyarakat yang kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni dan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan dari kategori lingkungan sehat perumahan.

#### **3.2. Bentuk Dan Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2015:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2015:3).

### **3.3. Sumber Data**

Menurut Rusiadi, dkk (2014:21) ada dua jenis data berdasarkan sumbernya yakni Data Primer dan Data Sekunder.

#### **3.3.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up date*. Untuk mendapatkan data primer,

peneliti harus mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku teori, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu:

1. Informan kunci yaitu Bapak Jakaria, S.Hut, MP selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues.
2. Informan utama yaitu Bapak Eris Diansyah, ST, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues.
3. Informan tambahan kesatu yaitu Bapak Zulkarnaen selaku pengulu Desa Beranang dan Bapak Kasim perwakilan dari masyarakat Desa Beranang.
4. Informan tambahan kedua yaitu Bapak Abd. Rahman D selaku pengulu Desa Tampeng dan Bapak M. Ali sebagai perwakilan dari masyarakat Dusun Desa Tampeng.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

#### **3.5.1. Observasi**

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang.

#### **3.5.2. Studi Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pada tahap dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data pendukung yakni data-data atau dokumen mengenai objek yang diteliti serta pengambilan gambar pada objek penelitian dengan tujuan agar dapat memperkuat data hasil dari wawancara yang disinergikan dengan data dokumentasi lapangan.

### 3.5.3. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin.

## 3.6. Defenisi Konsep dan Operasional

### 3.6.1. Defenisi Konsep

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar dari kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan atau pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.
3. Rumah dengan lingkungan sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah.

### 3.6.2. Defenisi Operasional

Pada penelitian ini defenisi operasional mengacu kepada teori Bidle and Thomas, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Harapan yaitu seseorang yang mempunyai peran tertentu untuk harapan-harapan orang lain melalui perilaku-perilaku yang pantas.
2. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
3. Wujud perilaku yaitu bentuk perilaku yang nyata berbeda dari satu aktor ke aktor yang lain.
4. Penilaian dan sanksi yaitu hal yang didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma dimana orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kuta Panjang.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang telah menjalankan perannya namun belum terlaksana secara efektif. Hal ini dilihat dari hasil analisis yang mengacu pada teori Biddle and Thomas (tahun berapa) yaitu dari indikator Harapan, Norma, Wujud Perilaku Penyelenggara, Penilaian Dan Sanksi.

- a. Harapan

Masyarakat yang kurang mampu dikecamatan Kutapanjang sangat berharap agar mendapatkan rumah layak huni, namun sampai saat ini harapan masyarakat tersebut belum dapat semua terpenuhi.

- b. Norma

Pelaksanaan program rumah layak huni dapat dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Qanun Bupati Gayo Lues nomor 3 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021, dan didukung tersedianya anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 95.586.000,- untuk per - 1 unit rumah dan kecamatan Kuta Panjang mendapat sebanyak 3 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp. 286.758.000. Tertuang dalam

Nomor DPA : Nomor DPA :  
 DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.05.0000/001/2021 tanggal 30 Desember 2020  
 beserta nama-nama penerima bantuan rumah layak huni yang tercantum  
 didalam DPA tersebut.

c. Wujud Perilaku Penyelenggara

Data yang berhak menerima bantuan rumah layak huni disampaikan dari Dinas perkim kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah mengambil keputusan sesuai dengan skala prioritasnya. Dalam Keputusan Kepala Daerah sering terjadi bahwa masyarakat yang sangat miskin dan sangat membutuhkan bantuan rumah tidak masuk kedalam skala prioritas dari Kepala Daerah.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian terhadap masyarakat yang kurang mampu sudah dilakukan berdasarkan SOP dan yang menerima bantuan rumah layak huni ditetapkan berdasarkan Qanun Bupati Gayo Lues nomor 3 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021, sehingga penyaluran bantuan sudah tepat sasaran.

2. Kendala Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan Bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang, meliputi 3 hal yaitu :

a. Kurangnya koordinasi antara SKPK dalam penetapan data masyarakat kurang mampu.

- b. Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia.
- c. Masih terjadi KKN didalam penentuan skala prioritas penerima bantuan yang dilakukan oleh pemangku jabatan dengan calon penerima bantuan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perlu disampaikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah kabupaten Gayo Lues meningkatkan jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun rumah layak huni pada tahun yang akan datang.
2. Dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar dilakukan tidak berdasarkan KKN (transparansi).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Secord, P.F & Backman, C. W. 1964. *Social Psychology*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Carr, A. 2004. *Positive Psychology; The Science of Happiness and Human Strengs*. New York: Brunner Routledge
- Davey, K.J. 2011. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek. Internasional dan Relevansinya dengan Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. *Manajemen Personalial*, Cetakan Keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Budiharjo. 2012. *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sadana, Agus. 2014. *Perencanaan Kawasan Pemukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusiadi, dkk. 2014. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Chandra, B. 2015. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Depdikbud. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Wesnawa. 2015. *Lingkungan Perumahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sarwono, Sarlito. 2016. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Untari. 2017. *Persyaratan Sarana Air Bersih*. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal :**

Dewi, Astri Purnama. 2013. *Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Permukiman Bagi Masyarakat Golongan Menengah Ke Atas di Kecamatan Ngaliyan, Semarang*. Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samsidar, Yulianti., Indarti Komala Dewi dan Bayu Wirawan. 2013. *Daya Dukung Lahan Untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. Universitas Pakuan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Khutami, Wien. 2015. *Kajian Kemampuan Dan Daya Tampung Lahan Perumahan Di Kawasan Perkotaan BWK Takengon Pusat*. Universitas Pasundan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. 2020. *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2020*.

Dinas Perkim Kab. Gayo Lues. 2020. *Penyusunan Database Lingkungan Sehat Perumahan Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020*.

**Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 829/MENKES/SK/VII/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues.

Qanun Bupati Gayo Lues nomor 3 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.05.0000/001/2021 tanggal 30 Desember 2020.